

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pertambahan penduduk yang terjadi secara dinamis, menghasilkan konsekuensi spasial yang serius bagi kehidupan manusia yaitu, tuntutan akan space untuk pemenuhan kebutuhan. Konsekuensi yang terjadi akibat laju pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali yakni, kebutuhan akan lahan menjadi semakin tinggi. Meningkatnya kebutuhan lahan akan berdampak pada penggunaan dan pemanfaatan lahan kawasan perkotaan. Kebutuhan akan lahan yang terus meningkat, haruslah memperhatikan daya dukung dan fungsi alamiah dari lahan (Dirk, 2018).

Siti Zubaidah,dkk, (2022) menyatakan bahwa pertumbuhan permukiman kumuh di perkotaan mengalami peningkatan sebesar 13.86%. Hal ini terjadi karena kurangnya sinergitas antara Pemerintah dan masyarakat serta belum adanya keterlibatan peran lembaga keamanan terkait penyelesaian masalah sosial. Kondisi ini ditunjukkan dengan masih adanya kriminalitas di kampung kumuh, tidak adanya akses rumah tangga terhadap sumber air minum layak dan sanitasi serta pembangunan sistem drainase yang belum memenuhi standar.

Peningkatan jumlah penduduk berbanding terbalik dengan daya dukung lahan, terutama di kawasan perkotaan atau kawasan yang memiliki daya tarik untuk meningkatkan perekonomian, misalnya kawasan perdagangan atau kawasan pariwisata. Semakin meningkat jumlah penduduk suatu kawasan semakin tinggi tingkat kepadatan kawasan tersebut yang berakibat semakin rendahnya daya dukung lahan. Kondisi ini apabila dibiarkan terus berlangsung, akan memicu terbentuknya kawasan kumuh yang akan berpengaruh terhadap kualitas lingkungan dan juga kesehatan masyarakat. Secara umum, pembangunan perumahan dan kawasan permukiman perkotaan menghadapi permasalahan rendahnya kualitas dan kuantitas infrastruktur permukiman yang berakibat pada rendahnya kualitas hidup penghuninya (Wardani et al., 2019).

Menurut UU Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni

karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Sementara menurut UN Habitat, 2024, permukiman kumuh atau informal per negara, didefinisikan oleh UN-Habitat sebagai indikator informalitas atas kurangnya akses terhadap air bersih, kurangnya akses terhadap sanitasi yang baik, kurangnya ruang hidup yang memadai dan kualitas/daya tahan bangunan, sementara proporsi penduduk perkotaan yang tinggal di perumahan yang tidak layak huni, dihitung berdasarkan rumah tangga dengan pengeluaran bersih bulanan untuk perumahan melebihi 30% dari total pendapatan bulannya.

Permukiman kumuh atau slum merupakan kondisi permukiman dengan kualitas buruk dan tidak sehat, tempat perlindungan bagi kegiatan marjinal serta sumber penyakit epidemik yang akhirnya akan menular ke wilayah perkotaan. Arini, 2024, menulis bahwa lebih dari sepertiga penduduk Indonesia, tepatnya 36,85% rumah tangga, tinggal di rumah yang tidak layak huni. Artinya, sekitar 36 hingga 37 dari setiap 100 rumah tangga hidup dalam kondisi yang jauh dari kata layak, yang tentu saja berdampak signifikan terhadap kesejahteraan mereka. Hingga tahun 2000, tercatat sekitar 29,9 juta jiwa penduduk Indonesia tinggal di kawasan kumuh perkotaan. Mereka menetap di lingkungan padat, sempit, dan minim akses air bersih, sanitasi, dan infrastruktur dasar lainnya. Berdasarkan data Kementerian PUPR, terdapat sekitar 4.170 hektare kawasan kumuh di seluruh Indonesia yang masih memerlukan intervensi penanganan. Menurut data BPS, 2024, dari 8.494 desa di Jawa Timur 177 diantaranya terdapat kawasan kumuh, dapat dikatakan 2,08% desa di Provinsi Jawa Timur terdapat kawasan kumuh yang memerlukan penanganan.

Di Indonesia, kota-kota umumnya berkembang dari kota kecil yang berfungsi sebagai sentra perdagangan tradisional, menjadi kota berukuran sedang, lalu menjadi besar, dan beberapa di antaranya berkembang menjadi kawasan metropolitan (Winarso et al., 2006). Masalah-masalah bencana ekologis yang terjadi seperti banjir, tanah longsor, kekeringan merupakan akibat dari kegiatan manusia dalam pemanfaatan lahan yang tidak memperhatikan kaidah-kaidah lingkungan dan kelestariannya.

Pada umumnya kajian tentang permukiman kumuh ditinjau dari kondisi fisik juga kondisi sosial ekonomi dan budaya. Kondisi fisik meliputi bangunan yang tidak teratur dengan kualitas konstruksi yang rendah, jalan yang rusak, tidak adanya akses untuk sanitasi layak dan drainase yang tidak berfungsi serta sampah belum dikelola dengan baik. Sementara kondisi sosial ekonomi dan budaya meliputi tingkat pendapatan masyarakat yang rendah, norma sosialnya yang longgar seperti kriminalitas pencurian dan narkoba, budaya kemiskinan yang mewarnai kehidupannya antara lain tampak dari sikap dan perilaku yang apatis, Dari dampak kedua kondisi tersebut mengakibatkan kondisi kesehatan yang buruk, timbul sumber pencemaran, sumber penyebaran penyakit dan perilaku menyimpang, yang berdampak pada kehidupan keseluruhannya. (Krisandriyana et al., 2019) Sehingga permasalahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh tidak akan selesai hanya dengan membangun infrastruktur, tetapi harus diimbangi dengan penanganan sosial dan ekonomi.

Dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) tahun 2024 yang disampaikan kepada BRIDA Jatim terdapat usulan terkait adanya gap yang cukup besar dalam penataan dan pemanfaatan lahan serta belum optimalnya pemanfaatan lahan produktif. Untuk itu diperlukan penelitian untuk mendapatkan informasi terkait sumber daya lokal yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penataan tata guna lahan yang baik.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap terbentuknya kawasan kumuh dan yang dapat memicu tumbuhnya kantong-kantong kemiskinan pada kawasan tersebut. Disamping itu juga dimaksudkan untuk menyusun strategi pengembangan kawasan permukiman yang layak huni. Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya memahami pengaruh beberapa faktor antara lain tingkat sosial ekonomi dan pendidikan, terhadap pembentukan permukiman di kawasan padat penduduk.

1.2. Rumusan Masalah

Penelitian ini berangkat dari adanya kawasan kumuh di perkotaan yang terbentuk antara lain karena angka kepadatan penduduk yang tinggi yang berdampak pada peningkatan kepadatan lahan, kurangnya tingkat pengetahuan dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan, rendahnya tingkat ekonomi. Dengan adanya intervensi, baik dari Pemerintah Kabupaten dan juga Pemerintah Provinsi Jawa Timur antara lain melalui pembenahan tata guna lahan, pendampingan dalam penerapan pola hidup sehat dan juga stimulan untuk meningkatkan akselerasi roda perekonomian masyarakat diharapkan akan terwujud kawasan tertata yang lebih sehat dan maju.

Rumusan masalah meliputi:

1. Bagaimana kondisi permukiman dan intervensi yang dilakukan pada kawasan kumuh di lokasi penelitian?
2. Bagaimana daya dukung lahan dan potensi sumber daya lokal pada kawasan lokasi penelitian?
3. Bagaimana model penataan dan pemanfaatan lahan di kawasan kumuh berbasis sumber daya lokal, kesadaran serta partisipasi masyarakat pada kawasan lokasi penelitian?

1.3. Maksud dan Tujuan

Kegiatan ini dimaksudkan untuk mendapatkan model peningkatan kualitas hidup masyarakat, lingkungan dan juga ekonomi, di kawasan kumuh yang mudah dalam pengimplementasiannya. Sedangkan tujuannya adalah untuk:

1. Mengetahui kondisi kawasan permukiman dan intervensi yang sudah dilakukan pada kawasan kumuh lokasi penelitian;
2. Mengetahui daya dukung lahan dan potensi sumber daya lokal yang belum diberdayakan secara optimal;
3. Mendapatkan model penataan dan pemanfaatan lahan di kawasan kumuh berbasis sumber daya lokal, kesadaran serta partisipasi masyarakat.

1.4. Hasil yang Diharapkan

Hasil yang diharapkan dari kegiatan Penelitian Penataan Kawasan Kumuh Berbasis Kemandirian Ekonomi dan Berwawasan Lingkungan adalah didapatkan model penataan kawasan kumuh yang berwawasan lingkungan dengan mengedepankan peran serta masyarakat sehingga mudah dalam pengimplementasiannya. Disamping itu model yang direkomendasikan berkorelasi dengan upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat, baik sarana prasarana fisik permukiman dan juga adanya peningkatan taraf ekonomi dan derajat kesehatan masyarakat melalui optimalisasi penataan dan pemanfaatan lahan berbasis potensi sumber daya lokal.

1.5. Sasaran

Sasaran kegiatan penelitian ini adalah kawasan kumuh yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Daerah berdasarkan beberapa parameter penetapan sebagai kawasan kumuh. Dari beberapa kawasan kumuh yang tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Daerah ditentukan satu kawasan pada setiap kabupaten. Pemilihan lokasi ini berdasarkan tinjauan awal dari hasil-hasil penelitian, perencanaan, dan pelaksanaan terdahulu, dievaluasi potensi yang belum dimanfaatkan secara optimal kemudian dikoordinasikan dengan stake holder di Pemerintah Kabupaten lokasi.

1.6. Ruang Lingkup Kegiatan

Untuk mencapai hasil yang optimal Penelitian Penataan Kawasan Kumuh Berbasis Kemandirian Ekonomi dan Berwawasan Lingkungan mencakup beberapa tahapan, yaitu:

- Identifikasi lokasi

Identifikasi lokasi dimaksudkan untuk menentukan kawasan penelitian dari beberapa alternatif kawasan yang tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Daerah. Hasil identifikasi didiskusikan dengan stake holder Pemerintah Kabupaten.

- Koordinasi awal internal

Koordinasi internal tim dimaksudkan untuk menyamakan visi dan persepsi antar anggota tim yang memiliki keahlian yang berbeda. Masing-masing anggota tim akan berkontribusi aktif dalam kegiatan penelitian ini untuk mencapai hasil penelitian yang optimal dan rekomendasi yang disarankan mudah untuk diimplementasikan.

- Koordinasi awal dengan instansi terkait

Koordinasi awal dengan instansi terkait adalah koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait penelitian pada lokasi kegiatan. Hal ini dimaksudkan untuk menginformasikan dan diskusi rencana kegiatan yang akan dilakukan.

- Pengumpulan materi sebagai rujukan penulisan

Mengumpulkan dan mereview beberapa karya tulis ilmiah dan juga karya tulis yang dapat diunduh dari media online dimaksudkan untuk mendapatkan rujukan kegiatan penelitian.

- Pengumpulan data sekunder dan primer

Data sekunder dikumpulkan melalui pengkajian hasil-hasil penelitian, kajian terdahulu yang didapat dari Perangkat Daerah terkait dan juga dari jurnal-jurnal tahun terbaru. Sedangkan data primer diperoleh melalui survey langsung di lapangan dengan pengisian kuesioner kepada sebagian penduduk di lokasi kegiatan penelitian.

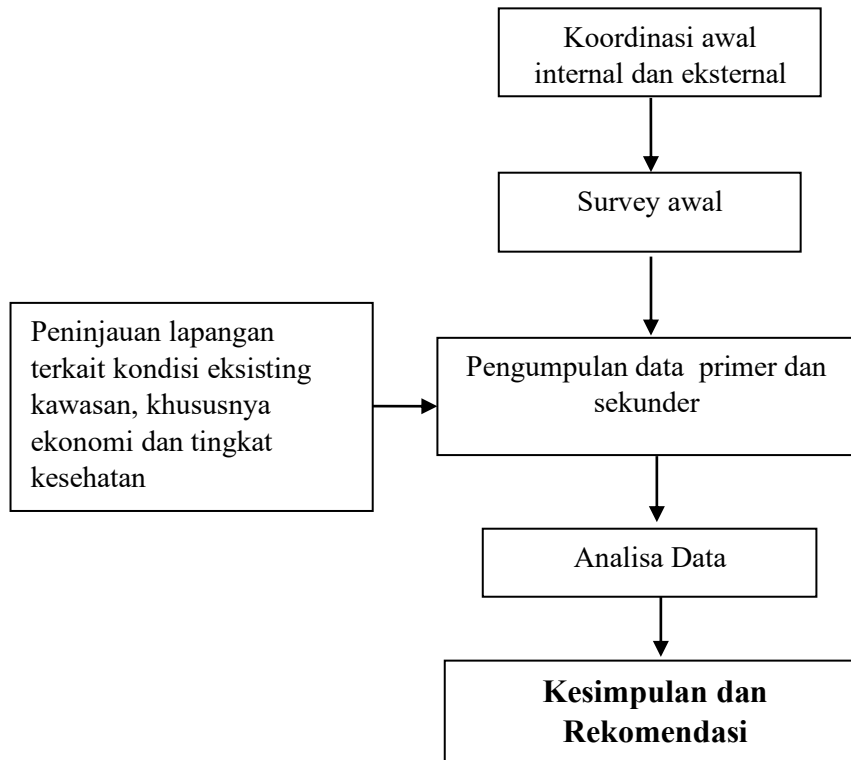
- Kajian dan Analisa

Kajian dan analisa hasil pengumpulan data primer dan juga data sekunder merujuk kepada Tata Ruang Kawasan, Tata Guna Lahan berikut rujukan lainnya yang relevan;

- Penyusunan Hasil Penelitian

Dari hasil pengumpulan data primer maupun sekunder disusun draft laporan yang dikompilasi dari masing-masing anggota tim. Penyusunan draft laporan ini berlangsung sejak awal kegiatan hingga presentasi di depan Tim Pengendali Mutu (TPM). Pada presentasi Draft Laporan Akhir didapat masukan dari TPM untuk menyempurnakan Laporan Penelitian. Laporan Penelitian merupakan kewajiban bagi Tim Pelaksana sebagai bukti telah dilakukannya kegiatan penelitian hingga didapatkannya kesimpulan berikut saran rekomendasi penelitian. Rekomendasi yang disarankan, sebagai hasil akhir kegiatan penelitian memuat terkait penataan

kawasan kumuh berbasis potensi sumber daya lokal yang mudah dipahami dan diimplementasikan. Secara ringkas metode tahapan penelitian ditunjukkan pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1. Diagram Tahapan Penelitian